

SISTEM AKUNTANSI PENJAMINAN DI PT JAMKRIDA NTB SYARIAH PERSERODA

Yuliana Marghareta Gaina¹

Email : a0c022166@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Widia Astuti²

Email : widia.astuti@unram.com

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Laporan ini membahas prosedur, tantangan, dan solusi terkait pengiriman uang antar bank menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mataram. Penelitian dilakukan melalui pendekatan magang praktik untuk mengamati proses transfer dana, mulai dari penerimaan instruksi nasabah, verifikasi data, pemrosesan transaksi, hingga konfirmasi. Tantangan utama mencakup masalah teknis sistem, keterlambatan akibat kesalahan input, koordinasi antar bank, serta faktor eksternal seperti regulasi berubah dan persaingan ketat. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan teknologi informasi, pelatihan staf, verifikasi ketat, serta adaptasi terhadap inovasi dan regulasi baru. Temuan ini diharapkan meningkatkan efisiensi transaksi, keamanan, dan kepuasan nasabah di sektor perbankan. PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda perlu meningkatkan penggunaan teknologi untuk sistem akuntansi yang lebih efisien, serta memperkuat pelatihan SDM dalam pengelolaan risiko dan prinsip syariah. Transparansi laporan keuangan harus lebih ditingkatkan agar mudah dipahami stakeholder. Selain itu, diversifikasi produk penjaminan, terutama untuk UMKM, dapat memperluas jangkauan. Audit internal dan eksternal yang lebih intensif diperlukan untuk menjaga kepatuhan, bersama dengan upaya sosialisasi keuangan syariah kepada masyarakat. Penguatan manajemen risiko juga penting untuk mengurangi potensi kerugian.

Kata kunci: Sistem Akuntansi, Penjaminan, Jamkrida

ABSTRACT

This report discusses the procedures, challenges, and solutions related to interbank money transfers using the Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) and Real Time Gross Settlement (RTGS) at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Mataram Branch Office. The research was conducted through an internship approach to observe the fund transfer process, starting from receiving customer instructions, data verification, transaction processing, to confirmation. The main challenges include technical system problems, delays due to input errors, coordination between banks, and external factors such as changing regulations and intense competition. The proposed solutions include improving information technology, staff training, strict verification, and adaptation to new innovations and regulations. These findings are expected to improve transaction efficiency, security, and customer satisfaction in the banking sector. PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda needs to increase the use of technology for a more efficient accounting system, as well as strengthen human resource training in risk management and sharia principles. Financial report transparency must be improved to make it easier for stakeholders to understand. In addition, diversification of guarantee products, especially for MSMEs, can expand reach. More intensive internal and external audits are needed to

maintain compliance, along with efforts to socialize sharia finance to the public. Strengthening risk management is also important to reduce potential losses.

Keywords: *Accounting System, Guarantee, Jamkrida*

PENDAHULUAN

Sistem akuntansi penjaminan di PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda penting untuk dipahami dalam konteks perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penjaminan merupakan suatu bentuk layanan keuangan yang sangat relevan, terutama mengingat pertumbuhan industri syariah yang terus meningkat. Dalam kerangka ini, akuntansi syariah memegang peranan penting dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan, termasuk dalam pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) (Azifah & Fitroh, 2022).

PT Jamkrida NTB Syariah sebagai lembaga penjaminan berbasis syariah sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah dan regulasi yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam operasionalnya, lembaga ini harus mematuhi standar syariah tersebut, termasuk dalam pengungkapan keuangan dan audit (Sawitri et al., 2017; (Darsono, 2022). Sebagaimana dijelaskan oleh Rahmadieni, efektivitas pengawasan syariah berpengaruh pada kualitas penyajian laporan keuangan (Rahmadieni, 2019), memberikan penekanan pada pentingnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi (Larasati & Sumardi, 2018).

Selain itu, dalam mengelola sistem akuntansi penjaminan, PT Jamkrida NTB Syariah harus memastikan bahwa semua proses akuntansi dan pelaporan mematuhi prinsip syariah yang berlaku, termasuk memenuhi ketaatan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh OJK dan DSN-MUI (Darsono, 2022). Dalam hal ini, sistem informasi akuntansi yang digunakan harus dirancang untuk dapat mencatat serta melaporkan semua transaksi dengan tepat dan akurat (HS et al., 2023). Penggunaan sistem informasi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen penjaminan (Khaddafi et al., 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi untuk memenuhi aspek formalitas administrasi, tetapi juga berupaya untuk menciptakan transparansi, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap praktik bisnis yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut (Mukhlis et al., 2022). Penjaminan yang dilakukan oleh PT Jamkrida NTB Syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memenuhi syarat-syarat syariah yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat (Aditiya et al., 2023; Cahyadi et al., 2023).

Dengan demikian, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengevaluasi sistem akuntansi penjaminan yang diterapkan di PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas dan kepatuhan terhadap standardisasi akuntansi syariah yang berlaku.

TINJAUAN LITERATUR

Definisi Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di dalam organisasi. Sebuah sistem akuntansi yang efektif memungkinkan manajemen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai posisi dan kinerja keuangan perusahaan Fauzi et al. (2023) Yogi, 2021). Sistem ini tidak hanya mencakup aspek pengukuran keuangan tetapi juga pencatatan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Sistem Akuntansi Penjaminan

Sistem akuntansi penjaminan, khususnya dalam konteks PT Jamkrida NTB Syariah, berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas penjaminan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini mencakup pengelolaan risiko yang terkait dengan penjaminan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Menurut Sanjaya dan Handayani, pengembangan sistem informasi penjaminan yang baik adalah kunci untuk menjaga mutu pelayanan yang diberikan kepada nasabah (Sanjaya & Handayani, 2021). Sistem ini juga harus memperhatikan aspek penjaminan mutu yang penting untuk menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah tersebut.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan utama dari penerapan sistem akuntansi penjaminan adalah untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap keamanan dan kepatuhan transaksi yang dilakukan oleh PT Jamkrida NTB Syariah. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi laporan yang akurat yang diperlukan untuk audit dan pengawasan (Najwa et al., 2023). Dengan memiliki sistem akuntansi yang baik, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban regulasinya tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Manfaat dari sistem akuntansi penjaminan yang terintegrasi mencakup peningkatan pengambilan keputusan manajerial, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, serta peningkatan reputasi organisasi di mata publik dan investor (Abdurrahmansyah & Rismawati, 2022; Rizal et al., 2020).

Dalam konteks PT Jamkrida NTB Syariah, keberadaan sistem akuntansi penjaminan yang terstruktur dengan baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta untuk berkontribusi kepada tujuan sosial yang lebih luas melalui produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Fadhli, 2020).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sistem akuntansi penjaminan yang diterapkan di PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda. Fokusnya adalah pada proses, prosedur, dan pencatatan akuntansi penjaminan sesuai prinsip syariah.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian dilakukan secara mendalam pada satu objek yaitu PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara rinci sistem akuntansi penjaminan yang berlaku.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi: Kantor pusat PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Waktu: Penelitian dilakukan selama 4 bulan pada bulan Agustus sampai Desember

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data Primer:

Wawancara: Dengan staf bagian akuntansi, manajemen risiko, dan auditor internal.

Observasi langsung: Terhadap proses pencatatan dan pelaporan penjaminan.

Data Sekunder:

Dokumen internal perusahaan seperti laporan keuangan, SOP akuntansi penjaminan, dan pedoman syariah.

Literatur akademik dan regulasi terkait akuntansi penjaminan syariah.

Teknik Analisis Data

- Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu:
- Reduksi data: Menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan dokumen.
- Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pemahaman.
- Penarikan kesimpulan: Menyimpulkan bagaimana sistem akuntansi penjaminan diterapkan dan apakah sesuai dengan prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Jamkrida NTB Syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit dengan prinsip syariah, yang didirikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB). PT ini berfungsi untuk memberikan jaminan kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan sektor-sektor lainnya yang membutuhkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba dan gharar (ketidakpastian). Sejak berdiri, PT Jamkrida NTB Syariah berperan penting dalam memperkuat sektor keuangan daerah, khususnya untuk mendukung pelaku usaha di NTB agar dapat mengakses kredit lebih mudah. Perusahaan ini juga berperan sebagai penghubung antara lembaga pembiayaan dan para debitur yang membutuhkan pembiayaan dengan prinsip syariah. PT Jamkrida NTB Syariah merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan perekonomian berbasis syariah di NTB. Dengan dukungan pemerintah dan prinsip syariah, PT Jamkrida NTB Syariah berupaya memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi daerah serta pengembangan usaha-usaha kecil yang berkelanjutan.

Sistem Akuntansi Penjaminan di PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda

Konsep Penjaminan Syariah

Sistem penjaminan yang diterapkan di PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda menggunakan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Jenis-jenis akad yang umum digunakan dalam penjaminan syariah adalah:

- Akad Kafalah: Sebagai akad penjaminan, di mana satu pihak (penjamin) bertanggung jawab terhadap kewajiban pihak lain (terjamin) jika pihak tersebut gagal memenuhi kewajiban.
- Akad Wakalah: Pemberian kuasa oleh pihak yang dijamin kepada penjamin untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan kewajiban yang dijamin. Dalam hal ini, akuntansi penjaminan akan melibatkan pencatatan transaksi berdasarkan akad-akad syariah tersebut.

Pemantauan Resiko

Sistem akuntansi penjaminan di PT Jamkrida NTB Syariah juga perlu memperhitungkan manajemen risiko. Penjaminan kredit membawa risiko tertentu, seperti risiko gagal bayar dari debitur. Oleh karena itu, sistem akuntansi harus dapat mencatat dan memantau risiko-risiko yang muncul serta membuat cadangan kerugian penjaminan (provisi) yang cukup untuk menanggulangi kemungkinan tersebut. Provisi Kerugian Penjaminan : Untuk memitigasi risiko gagal bayar, perusahaan perlu membentuk cadangan untuk kerugian yang mungkin terjadi

akibat klaim yang tidak terduga. Cadangan ini dihitung berdasarkan pengalaman klaim dan analisis risiko.

Penerapan Prinsip Syariah dalam Akuntansi

Sistem akuntansi di PT Jamkrida NTB Syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Hal ini termasuk pemisahan antara pendapatan yang halal dan yang haram, serta pencatatan yang tidak mengandung unsur riba. Misalnya, perusahaan tidak dapat mengenakan bunga pada pinjaman yang dijamin, dan segala transaksi yang dilakukan harus berbasis pada akad yang sah menurut hukum Islam.

Penerapan Teknologi dalam Sistem Akuntansi

Di era digital, banyak perusahaan termasuk PT. Jamkrida NTB Syariah yang mulai menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap transaksi penjaminan dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, serta memfasilitasi pembuatan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Prinsip Akuntansi Syariah dalam Penjaminan

- a. Kepatuhan pada Prinsip Syariah: Semua transaksi harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian). Akad-akad yang digunakan dalam penjaminan haruslah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Akad-akad yang biasa digunakan dalam penjaminan syariah adalah Kafalah (jaminan), Wakalah (kuasa), dan Murabahah (jual beli dengan margin).
- b. Pemisahan Pendapatan Halal dan Haram: Dalam menjalankan bisnis penjaminan, perusahaan harus memisahkan pendapatan yang dihasilkan dari transaksi yang halal dan tidak melanggar hukum syariah. Pengelolaan dana harus sesuai dengan prinsip halal, dan investasi yang dilakukan tidak boleh mencakup instrumen atau sektor yang bertentangan dengan hukum Islam (misalnya, perusahaan yang bergerak dalam alkohol, perjudian, dan sebagainya).

Jamkrida akan menggantikan kewajiban tersebut. Pencatatan untuk transaksi ini adalah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi jika terjadi klaim. Jenis Akad yang Digunakan dalam Penjaminan :

- a. Akad Kafalah (Penjaminan) Dalam akad ini, PT Jamkrida bertindak sebagai penjamin. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, PT Jamkrida akan menggantikan kewajiban tersebut. Pencatatan untuk transaksi ini adalah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi jika terjadi klaim.
- b. Akad Wakalah (Kuasa): Di mana PT Jamkrida bertindak sebagai wakil dari pihak yang dijamin untuk menyelesaikan transaksi tertentu atau melakukan tindakan atas nama mereka. Ini berhubungan dengan pencatatan penerimaan premi dan biaya yang timbul akibat pemberian kuasa ini.
- c. Akad Murabahah (Jual Beli dengan Margin): Terkadang digunakan dalam konteks pembiayaan atau investasi terkait dengan penjaminan. Dalam akad ini, perusahaan membeli barang atau aset, lalu menjualnya kepada pihak lain dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Pencatatan Transaksi Penjaminan

Setiap transaksi penjaminan yang dilakukan oleh PT Jamkrida NTB Syariah harus dicatat dengan cara yang sesuai dengan standar akuntansi syariah. Berikut adalah contoh pencatatan yang lebih mendalam:

a. Pencatatan Premi Penjaminan

Setiap premi yang diterima oleh PT Jamkrida dari nasabah yang menggunakan layanan penjaminan harus dicatat sebagai pendapatan yang sah, tetapi juga diperhatikan apakah premi tersebut harus ditangguhkan atau tidak, tergantung pada periode penjaminan yang berlangsung. Contoh:

Transaksi Penerimaan Premi:

Debit: Kas/Bank

Kredit: Pendapatan Premi Penjaminan

Jika premi tersebut diterima untuk periode yang akan datang, maka akan dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan akan diakui seiring berjalannya waktu (akrual).

b. Pencatatan Klaim Penjaminan

Jika terjadi klaim karena gagal bayar oleh debitur yang dijamin, PT Jamkrida perlu mencatat klaim sebagai kewajiban yang harus dibayar kepada pihak ketiga atau bank. Pencatatan klaim juga melibatkan pengakuan beban penjaminan yang timbul akibat klaim tersebut.

Contoh:

Pencatatan Kewajiban Klaim:

Debit: Beban Penjaminan

Kredit: Kewajiban Klaim Penjaminan

Ketika klaim dibayar, perusahaan akan mengurangi kewajiban tersebut dan mengeluarkan kas atau dana yang terkait dengan klaim.

c. Pencadangan Kerugian Penjaminan

Untuk mengantisipasi potensi kerugian dari klaim di masa depan, perusahaan harus menyediakan cadangan kerugian barang oleh konsumen kepada produsen. Proses ini terjadi ketika barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan. Penjaminan. Cadangan ini dibentuk berdasarkan proyeksi risiko gagal bayar yang mungkin timbul.

Contoh Pencatatan Cadangan Kerugian:

Pencatatan Cadangan:

Debit: Beban Cadangan Kerugian Penjaminan

Kredit: Cadangan Kerugian Penjaminan

Ini adalah langkah preventif untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan agar tetap mampu memenuhi kewajiban apabila klaim meningkat.

Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana merupakan bagian penting dalam operasional perusahaan penjaminan. Dana yang dihimpun dari premi penjaminan harus dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan dalam mengelola dana adalah menghindari investasi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti investasi dalam instrumen berbasis bunga (riba) atau sektor yang dilarang (alkohol, perjudian, dll).

a. Investasi Halal

PT Jamkrida NTB Syariah berinvestasi dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), saham-saham yang terdaftar di indeks syariah, atau sektor

yang tidak melanggar hukum Islam. Akuntansi untuk investasi ini juga harus dicatat dengan tepat, termasuk pengakuan pendapatan dari investasi.

b. Pemantauan Arus Kas

Sistem akuntansi juga harus memantau arus kas yang terkait dengan operasi penjaminan, yang meliputi arus kas dari penerimaan premi, pembayaran klaim, serta aliran kas dari kegiatan investasi. Laporan arus kas harus disusun dengan hati-hati untuk memastikan keberlanjutan operasional dan mencatat aliran kas yang tidak melanggar prinsip syariah.

Penyusunan Laporan Keuangan

Sistem akuntansi di PT Jamkrida NTB Syariah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Laporan yang disusun antara lain:

- a. Laporan Laba Rugi: Menyajikan pendapatan dari premi penjaminan, beban klaim, dan biaya operasional lainnya, termasuk beban dari cadangan kerugian penjaminan.
- b. Neraca: Menyajikan posisi keuangan perusahaan, dengan rincian mengenai aset, kewajiban (termasuk klaim yang belum dibayar), dan ekuitas perusahaan.
- c. Laporan Arus Kas: Menggambarkan bagaimana kas yang diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan, baik dari kegiatan operasional, investasi, maupun pembiayaan.

Audit Syariah

Sebagai perusahaan yang berbasis syariah, PT Jamkrida NTB Syariah juga perlu menjalani audit syariah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan kegiatan operasional perusahaan tidak melanggar prinsip syariah. Audit ini dilakukan oleh auditor yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi syariah.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko sangat penting dalam sistem akuntansi penjaminan, karena perusahaan harus siap menghadapi klaim yang lebih besar dari perkiraan atau risiko gagal bayar dari debitur. Beberapa langkah manajemen risiko yang diterapkan di PT Jamkrida NTB Syariah antara lain:

- a. Evaluasi Risiko Debitur: PT Jamkrida perlu melakukan evaluasi dan analisis yang cermat terhadap debitur yang dijamin untuk memitigasi risiko gagal bayar. Penjaminan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan debitur untuk membayar kembali.
- b. Cadangan Kerugian: Sebagaimana telah disebutkan, perusahaan harus mencatat cadangan kerugian penjaminan berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi, yang akan digunakan untuk menutup potensi kerugian dari klaim yang tidak terduga.

Penerapan Teknologi

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, PT Jamkrida NTB Syariah dapat memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem informasi akuntansi berbasis cloud atau perangkat lunak akuntansi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis dan pengelolaan data yang lebih terintegrasi. Teknologi ini juga membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Sistem dan Diagram Alir Penjaminan di PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda

1. Pendaftaran dan Permohonan Penjaminan

Pengajuan Permohonan: Pihak yang membutuhkan jaminan (debitur atau peminjam) mengajukan permohonan penjaminan kepada PT Jamkrida NTB Syariah. Biasanya, permohonan ini dilakukan setelah pihak debitur mengajukan pembiayaan atau kredit kepada lembaga pembiayaan atau perbankan yang bekerja sama dengan PT Jamkrida.

Dokumentasi: Pemohon harus melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti identitas, data finansial, dan perjanjian kredit atau pembiayaan yang telah disetujui dengan lembaga pembiayaan atau bank.

2. Analisis Risiko dan Kelayakan

Analisis Kelayakan: PT Jamkrida NTB Syariah akan melakukan analisis terhadap pemohon dan risiko yang terkait dengan penjaminan. Ini termasuk menilai kelayakan finansial debitur dan kemampuan untuk melunasi kewajiban yang dijamin. Verifikasi Dokumen: Semua dokumen yang diajukan oleh pihak debitur akan diverifikasi untuk memastikan bahwa mereka sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Syariah: Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir. Penjaminan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

3. Persetujuan dan Penandatanganan Perjanjian

Persetujuan: Setelah analisis selesai dan semua dokumen valid, PT Jamkrida NTB Syariah akan memberikan persetujuan atas permohonan penjaminan. Jika disetujui, pihak perusahaan akan memberikan surat persetujuan jaminan.

Perjanjian Penjaminan: Pada tahap ini, dilakukan penandatanganan perjanjian penjaminan antara PT Jamkrida NTB Syariah dan debitur. Perjanjian ini berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta besar jumlah yang dijamin dan ketentuan lainnya.

Jenis Penjaminan: Dalam penjaminan syariah, seringkali digunakan akad-akad seperti akad kafalah (jaminan) atau akad wakalah (penitipan atau pengelolaan). PT Jamkrida NTB Syariah bertindak sebagai pihak yang memberi jaminan atas kewajiban pihak yang dijamin.

4. Pencairan Penjaminan

Pencairan Pembiayaan: Setelah proses penjaminan disetujui, lembaga pembiayaan atau bank yang bekerja sama akan mencairkan pembiayaan atau kredit kepada debitur. Proses ini mengarah pada penggunaan jaminan yang diberikan oleh PT Jamkrida NTB Syariah untuk menjamin pembayaran kewajiban debitur.

Pencatatan Penjaminan: Pencairan ini juga akan dicatat dalam sistem akuntansi PT Jamkrida NTB Syariah sebagai kewajiban yang dijamin.

5. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan: PT Jamkrida NTB Syariah melakukan pemantauan atas kewajiban debitur secara berkala, untuk memastikan bahwa debitur tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Pemantauan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengurangi kerugian bagi perusahaan.

Laporan Keuangan: Secara periodik, PT Jamkrida NTB Syariah akan menyusun laporan keuangan yang mencakup status penjaminan, cadangan klaim, dan performa keuangan perusahaan.

6. Penyelesaian Klaim (Jika Ada)

Pengajuan Klaim: Jika debitur gagal membayar kewajibannya, maka pihak pemberi pembiayaan dapat mengajukan klaim kepada PT Jamkrida NTB Syariah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penjaminan.

Penyelesaian Klaim: PT Jamkrida NTB Syariah akan melakukan pembayaran klaim sesuai dengan perjanjian. Pembayaran klaim ini biasanya berasal dari dana yang sudah dipersiapkan dalam bentuk cadangan klaim atau dana tabarru' yang dikelola perusahaan.

Selesaikan Klaim: Setelah klaim diselesaikan, perusahaan akan melakukan pencatatan dan memastikan bahwa dana yang dikeluarkan untuk penyelesaian klaim sesuai dengan ketentuan.

7. Penyelesaian Akhir

Penyelesaian Pembayaran: Jika seluruh kewajiban telah dipenuhi, baik oleh debitor atau perusahaan penjamin, proses penjaminan akan berakhir. Pihak yang dijamin akan mendapatkan surat pengakhiran jaminan.

Laporan dan Evaluasi: PT Jamkrida NTB Syariah akan mengevaluasi seluruh proses penjaminan untuk meningkatkan layanan dan mengelola risiko di masa depan.

Prinsip Syariah dalam Penjaminan

Selama proses penjaminan, PT Jamkrida NTB Syariah tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup:

- a. Kepastian (Tawakkul): Tidak ada unsur ketidakpastian (gharar) yang berlebihan dalam transaksi.
- b. Tanpa Riba: Semua transaksi dilakukan tanpa melibatkan bunga (riba).
- c. Tidak Ada Unsur Maysir: Transaksi tidak mengandung unsur spekulasi yang berlebih

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem akuntansi penjaminan di PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda mengintegrasikan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan penjaminan. Proses pencatatan dilakukan secara transparan dan akurat, dengan fokus pada pengelolaan risiko yang baik untuk menjaga kestabilan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK yang berlaku untuk perusahaan syariah, memastikan kepatuhan pada standar akuntansi yang diterima. Selain itu, perusahaan rutin melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan sistem akuntansi berjalan dengan baik dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, sistem ini mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam setiap transaksi penjaminan yang dilakukan. PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda perlu meningkatkan penggunaan teknologi untuk sistem akuntansi yang lebih efisien, serta memperkuat pelatihan SDM dalam pengelolaan risiko dan prinsip syariah. Transparansi laporan keuangan harus lebih ditingkatkan agar mudah dipahami stakeholder. Selain itu, diversifikasi produk penjaminan, terutama untuk UMKM, dapat memperluas jangkauan. Audit internal dan eksternal yang lebih intensif diperlukan untuk menjaga kepatuhan, bersama dengan upaya sosialisasi keuangan syariah kepada masyarakat. Penguatan manajemen risiko juga penting untuk mengurangi potensi kerugian.

REFERENSI

- Abdurrahmansyah, A. and Rismawati, I. (2022). Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Melalui Sistem Penjamin Mutu Dengan Pendekatan Total Quality Managemen. *Jurnal Perspektif*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i2.177>
- Aditiya, W., Qolbi, S., Aiman, A., Widyawati, W., & Latifah, E. (2023). Peluang Dan Tantangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Ecotechnopreneur*, 2(01), 11-20. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i01.538>
- Azifah, N. and Fitroh, K. (2022). Determinan Pengungkapan Sharia Compliance Perbankan Syariah Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional Aaoifi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(3), 138-150. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i3.499>
- Cahyadi, A., Amalia, E., & Amilin, A. (2023). Evaluasi Kebijakan Spin Off Pada Industri Asuransi Syariah Di Indonesia. *Aksar Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 121. <https://doi.org/10.21043/aksar.v6i1.22384>
- Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 43-53. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.5>

- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Al-Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 53-65. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>
- Fauzi, F., Rahmayana, L., Wulandari, I., & Sugiharto, B. (2023). Mengapa Digitalisasi Akuntansi Harus Di Lakukan Pada Perusahaan Umkm : Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Aktiva Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 43-56. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.179>
- HS, W., Agus, A., Salsabila, M., & Harahap, N. (2023). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Emt Kita*, 7(2), 317-324. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.891>
- Khaddafi, M., Sarumpaet, A., Luthfi, N., Khairani, N., Nisa, K., & Atamy, M. (2024). Peran Akuntansi Syariah Perspektif Muamalah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. *JIESA*, 1(6), 12-22. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.572>
- Larasati, M. and Sumardi, S. (2018). Pelatihan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Bagi Peningkatan Kualitas Pengetahuan Dan Kemampuan Siswa Di Smk Plus Ashabulyamin Kabupaten Cianjur. *Syukur (Jurnal Inovasi Sosial Dan Pengabdian Masyarakat)*, 1(2), 168. https://doi.org/10.22236/syukur_vol1/is2pp168-177
- Mukhlis, M., Mawaddahirham, M., Sugianto, S., & JAUHARI, F. (2022). Islamic Issues Social Responsibility Islamic Banking. *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 33. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.286>
- Najwa, L., Iqbal, M., & Aryani, M. (2023). Manajemen Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Visionary Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 11(1), 72. <https://doi.org/10.33394/vis.v11i1.7391>
- Rahmadieni, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 128. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10038>
- Rizal, S., Usman, T., Azhar, A., & Puspita, Y. (2020). Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sistem Penjaminan Mutu. *Didaktika Jurnal Kependidikan*, 9(4), 469-475. <https://doi.org/10.58230/27454312.152>
- Sanjaya, R. and Handayani, R. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu (Simantu) Lldikti Wilayah Iv. *Naratif Jurnal Nasional Riset Aplikasi Dan Teknik Informatika*, 3(01), 48-53. <https://doi.org/10.53580/naratif.v3i01.119>
- Sawitri, D., Juanda, A., & Jati, A. (2017). Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(2). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v15i2.1876>
- Yogi, A. (2021). Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.. <https://doi.org/10.31237/osf.io/qjdxxy>